

## **ANALISIS DAMPAK REALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DAN DINAMIKA EKOSISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA**

**Febrian Nafisa Nurul Afida**

STAI Senori Tuban, Indonesia

Email: [febriannafisanurulafida@staisenorituban.ac.id](mailto:febriannafisanurulafida@staisenorituban.ac.id)

**Siti Maftuhah**

STAI Senori Tuban, Indonesia

Email: [sitimaftuhah@staisenorituban.ac.id](mailto:sitimaftuhah@staisenorituban.ac.id)

### ***Abstract***

*The dynamics of budget reallocation policies in Indonesia, which continue to evolve in response to economic pressures, national development priorities, and global crises, have the potential to affect the quality of educational services, equity of access, and the sustainability of the national education ecosystem. In the context of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 4 on quality education, it is essential to examine the extent to which such policies impact the achievement of sustainable development targets. This article aims to analyze the impact of education budget reallocation on the dynamics of the national education ecosystem and its implications for the achievement of SDGs in Indonesia. This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical research design, utilizing literature review and policy analysis of official government documents, education reports, and relevant secondary data. The findings indicate that education budget reallocation has a dual impact. On the one hand, it enhances efficiency and responsiveness to urgent needs. On the other hand, it potentially creates disparities in access and a decline in the quality of educational services, particularly in certain regions. Furthermore, the dynamics of the education ecosystem, shaped by technological factors, policies, and educational actors, play a crucial role in determining the success of SDG implementation in the education sector.*

**Keyword:** *Budget Reallocation, National Education, Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia*

### **Pendahuluan**

Realokasi dana pendidikan terjadi karena adanya perubahan prioritas kebijakan pemerintah dalam mengelola anggaran negara, sehingga sebagian dana yang sebelumnya dialokasikan untuk sektor pendidikan dialihkan atau disesuaikan untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak. Dalam konteks kebijakan fiskal Indonesia saat ini, salah satu isu yang memicu perdebatan public adalah penggunaan Sebagian anggaran Pendidikan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Aini & Indarti, 2025). Program ini merupakan salah satu program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah serta menekan angka stunting sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Namun, kebijakan tersebut memunculkan diskursus

yang cukup tajam di ruang public. Berdasarkan dokumen APBN 2026, total anggaran pendidikan Indonesia mencapai sekitar Rp. 769 triliun yang secara konstitusional memang harus memenuhi minimal 20% dari belanja negara. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp. 223,5 triliun atau hampir 29% dialokasikan untuk program MBG melalui Badan Gizi Nasional (Aji et al., 2025).

Masuknya anggaran MBG ke dalam pos Pendidikan memicu kritik dari sejumlah kalangan, terutama karena dana yang sangat besar tersebut dinilai tidak secara langsung memperkuat sistem Pendidikan seperti peningkatan kualitas guru, perbaikan sarana-prasarana sekolah, ataupun pengembangan inovasi pembelajaran. Sebagian pengamat menilai bahwa meskipun program ini menyasar peserta didik, orientasinya lebih dekat pada kebijakan kesejahteraan sosial dan Kesehatan masyarakat daripada Pembangunan sistem Pendidikan itu sendiri (Aji et al., 2025). Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah bentuk pemotongan anggaran pendidikan. Pemerintah berargumen bahwa MBG justru merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia, karena kondisi gizi yang baik dianggap sebagai prasarat penting bagi peningkatan kemampuan belajar dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, program ini dimasukkan dalam fungsi Pendidikan tanpa mengurangi komitmen negara terhadap alokasi minimal 20% anggaran Pendidikan (Mbg et al., 2026).

Berangkat dari dinamika kebijakan tersebut, muncul sejumlah pertanyaan mendasar dari penulis mengenai arah prioritas pembangunan pendidikan nasional di tengah perubahan distribusi anggaran negara. Jika sebagian anggaran Pendidikan dialihkan untuk mendukung program intervensi sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), maka perlu dipertanyakan bagaimana realokasi anggaran tersebut mempengaruhi pemerataan kualitas akses dan layanan Pendidikan di berbagai daerah dalam upaya mencapai target SDG 4 (Quality Education) di Indonesia (Masruri & Nugraha, 2026). Di saat yang sama, perubahan komposisi alokasi anggaran juga menimbulkan pertanyaan lain mengenai sejauh mana kebijakan tersebut berdampak pada keberlanjutan ekosistem pendidikan nasional yang mencakup kualitas tenaga pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta pengembangan inovasi pembelajaran dalam mendukung pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika pemerintah menempatkan program MBG sebagai bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah berargumen bahwa pemenuhan gizi yang baik merupakan salah satu prasarat penting bagi peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Dengan kondisi tubuh yang sehat dan kebutuhan nutrisi yang terpenuhi, peserta didik diharapkan memiliki daya konsentrasi yang lebih baik serta kesiapan fisik yang lebih kuat dalam menjalani aktivitas belajar di sekolah.

Namun demikian, argumentasi tersebut juga memunculkan sejumlah pertanyaan kritis yang perlu dicermati secara lebih mendalam. Jika MBG diposisikan sebagai instrument peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi peserta didik (Risnawati et al., 2025), maka aspek pertama yang harus dipastikan adalah apakah makanan yang disediakan benar-benar memenuhi standar kesehatan dan kelayakan konsumsi. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai pemberitaan di media massa menunjukkan adanya kasus makanan dalam program MBG yang dinilai tidak layak dikonsumsi, contoh kasus yang terjadi seperti halnya adanya makanan yang basi hingga kualitas bahan yang diragukan

sebanyak 35,9% data survei KPAI CISDI WVI (35,9%) sebagai data kuantitatif yang mendukung narasi bahwa insiden makanan tidak layak cukup luas (Studi et al., 2025). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa tujuan peningkatan kualitas gizi dapat terhambat apabila pengawasan terhadap kualitas makanan tidak dilakukan secara ketat dan berkelanjutan. Di sisi lain, perlu pula dipahami bahwa pemenuhan gizi yang baik tidak secara otomatis menjamin peningkatan kecerdasan ataupun keterampilan peserta didik. Secara rasional dan ilmiah, gizi yang baik lebih berperan dalam menjaga Kesehatan fisik, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung perkembangan biologis anak.

Sementara itu, peningkatan kecerdasan, kemampuan berpikir kritis, maupun keterampilan akademik tetap sangat bergantung pada kualitas proses pendidikan itu sendiri, seperti kompetensi guru, metode pembelajaran, lingkungan belajar yang kondusif, serta ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai (Jarmita, 2025). Dengan demikian, gizi yang baik dapat dipahami sebagai fondasi kesehatan bagi peserta didik, tetapi tidak dapat menggantikan peran utama sistem pendidikan dalam membentuk kapasitas intelektual dan keterampilan generasi muda. Meski demikian, polemik ini menunjukkan adanya perbedaan perspektif dalam memaknai prioritas pembangunan sumber daya manusia. Sebagian pihak melihat program MBG sebagai strategi intervensi sosial untuk memperkuat fondasi Kesehatan generasi muda, sementara, sementara pihak lain menilai bahwa penggunaan porsi besar anggaran pendidikan untuk program tersebut berpotensi menggeser fokus utama Pembangunan Pendidikan Nasional (Qadafi, 2026). Perdebatan ini pada akhirnya memperlihatkan dilema kebijakan antara kebutuhan intervensi sosial jangka pendek dan investasi pendidikan jangka panjang dalam upaya mencapai kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan.

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis (Heryana & Unggul, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam fenomena realokasi anggaran pendidikan serta dinamika ekosistem pendidikan nasional dalam kaitannya dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya memotret data secara kuantitatif, tetapi juga menafsirkan makna kebijakan, kontes sosial, serta implikasi yang ditimbulkan dari perubahan alokasi anggaran pendidikan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data skunder (Iii et al., 2023) yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan literatur ilmiah. Dokumen tersebut meliputi kebijakan anggaran pendidikan seperti APBN dan RAPBN, laporan kementerian terkait, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan SDGs Indonesia, serta publikasi dari lembaga internasional seperti UNESCO. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan jurnal ilmiah, buku referensi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun terakhir untuk memperkuat landasan analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka digunakan untuk mengkaji konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan anggaran pendidikan, ekosistem pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan (Karuru, 2013). Sementara itu, teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai dokumen kebijakan serta laporan yang berkaitan dengan realokasi

anggaran pendidikan di Indonesia. Adapun Langkah-langkah penelitian dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah terkait realokasi anggaran Pendidikan dan kaitannya dengan SDGs
2. Mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur dan dokumen resmi
3. Mengklasifikasikan data berdasarkan tema utama, yaitu kebijakan anggaran, dinamika ekosistem Pendidikan, dan indikator SDGs
4. Melakukan reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dan membuang data yang tidak berkaitan
5. Menyajikan data dalam bentuk uraian deskriptif yang terstruktur
6. Menarik kesimpulan melalui proses interpretasi terhadap temuan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah secara mendalam isi dokumen untuk mengidentifikasi kebijakan realokasi anggaran Pendidikan serta dampaknya terhadap kualitas, akses, dan pemerataan Pendidikan (Iii et al., 2023). Analisis ini juga dilakukan dengan mengaitkan temuan yang diperoleh dengan indikator SDGs, khususnya pendidikan berkualitas sebagai poin keempat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan pemaknaan terhadap hubungan antara kebijakan anggaran dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dari dokumen yang berbeda (Penggunaan et al., 2015). Selain itu, peneliti juga memastikan bahwa sumber yang digunakan berasal dari referensi yang kredibel, baik dari lembaga resmi maupun publikasi ilmiah yang telah teruji.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Ketimpangan Akses Pendidikan dan Tantangan Pencapaian SDGs 4 Di Indonesia**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan serius dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan, terutama ditandai oleh disparitas antarwilayah, kondisi sosial ekonomi, serta keterbatasan infrastruktur pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengurai kesenjangan sosial dan mendorong pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia dan kemajuan suatu bangsa (Masruri & Nugraha, 2026). Dalam perspektif pembangunan modern, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing suatu negara di tingkat global. Negara yang memiliki sistem pendidikan yang baik cenderung memiliki tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi serta tingkat kemiskinan yang lebih rendah (Susanto & Indah Pangesti, 2019). Hal ini terlihat dari berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidupnya.

Data menunjukkan bahwa individu yang tidak menamatkan pendidikan dasar memiliki tingkat kemiskinan sekitar 24,5%, sedangkan mereka yang berpendidikan diploma atau sarjana hanya sekitar 2,1%. Fakta ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan mobilitas sosial masyarakat (Ustama, 2006).

Dalam konteks pembangunan global, pentingnya pendidikan kemudian diintegrasikan ke dalam agenda pembangunan internasional melalui program Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan agenda pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari program Millennium Development Goals (MDGs). Program ini terdiri dari 17 tujuan Pembangunan global yang dirancang untuk dicapai hingga tahun 2030 dengan tujuan utama menciptakan Pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan (Sudirman & Lestari, 2024). Setiap tujuan dalam SDGs saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keberhasilan suatu tujuan sering kali bergantung pada pencapaian tujuan lainnya. Misalnya, pengentasan kemiskinan, peningkatan Kesehatan, ketahanan pangan, hingga Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan semuanya memiliki hubungan erat dengan kualitas Pendidikan masyarakat (Oktavianatun & Nugraheni, 2024).

Salah satu tujuan penting dalam agenda tersebut adalah SDG 4, yaitu Quality Education atau pendidikan berkualitas. Tujuan ini menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas sepanjang hayat. SDGs 4 tidak hanya berfokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah, tetapi juga pada peningkatan kualitas proses pembelajaran, pemerataan akses Pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten, serta dukungan sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai (Ardiansyah, 2025). Dengan demikian, pendidikan berkualitas dipandang sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan global. Namun demikian, dalam praktik pembangunan global maupun nasional, perhatian terhadap berbagai tujuan SDGs sering kali tidak berjalan secara seimbang. Beberapa tujuan seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan peningkatan gizi sering menjadi fokus utama kebijakan pembangunan karena dianggap berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Misalnya, tujuan yang berkaitan dengan penghapusan kelaparan dan peningkatan ketahanan pangan kerap mendapatkan perhatian besar karena menyangkut keberlangsungan hidup manusia secara langsung (Haida et al., 2024). Akan tetapi, apabila perhatian terhadap pendidikan tidak ditempatkan sebagai prioritas yang setara, maka upaya pencapaian tujuan-tujuan lainnya justru berpotensi mengalami hambatan struktural dalam jangka panjang.

Hal ini disebabkan oleh pendidikan yang memiliki peran fundamental dalam mendukung pencapaian berbagai tujuan pembangunan lainnya. Pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan individu dalam memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan kata lain, Pendidikan berfungsi sebagai enabler atau penggerak utama bagi pencapaian tujuan Pembangunan lainnya (Oktavianatun & Nugraheni, 2024). Tanpa pendidikan yang berkualitas, upaya mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, atau mencapai ketahanan pangan akan sulit berjalan

secara berkelanjutan. Di Indonesia, tantangan dalam mewujudkan Pendidikan berkualitas masih cukup kompleks. Salah satu persoalan utama yang sering muncul adalah ketimpangan akses pendidikan antarwilayah. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang relatif besar dan melaksanakan berbagai program bantuan pendidikan, kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil dalam hal kualitas layanan pendidikan (Akses et al., 2025). Tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sekolah, tetapi juga dengan kualitas tenaga pendidik, fasilitas pendidikan, serta akses terhadap teknologi pembelajaran.

Berbagai survei menunjukkan bahwa ketimpangan akses pendidikan masih menjadi tantangan utama dalam sistem pendidikan Indonesia. Sebuah survei global menunjukkan bahwa sekitar 59% responden di Indonesia menilai ketimpangan akses pendidikan sebagai masalah terbesar dalam sektor pendidikan, diikuti oleh keterbatasan infrastruktur pendidikan dan kualitas tenaga pendidik. Selain itu, kesenjangan juga terlihat dari Tingkat partisipasi Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi (Bahari & Tanjungpura, 2024). Data menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia pada tahun 2024 hanya sekitar 32%, yang berarti hanya sekitar sepertiga penduduk usia 19-23 tahun yang dapat mengakses pendidikan tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi masih belum merata dan masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Ketimpangan ini semakin diperparah oleh berbagai factor structural seperti kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur Pendidikan, serta ketimpangan sosial ekonomi masyarakat (Ardianti et al., 2025). Di daerah terpencil dan tertinggal, keterbatasan fasilitas pendidikan, minimnya tenaga pendidik, serta akses teknologi yang terbatas sering kali menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bahkan, perkembangan teknologi pendidikan yang seharusnya dapat memperluas akses pembelajaran digital juga masih menghadapi kesenjangan antardaerah karena tidak semua daerah memiliki infrastruktur digital yang memadai.

Dengan demikian, pendidikan berkualitas tidak hanya menjadi agenda pembangunan nasional, tetapi juga merupakan bagian penting dari komitmen global Indonesia dalam mencapai target SDGs. Namun, berbagai tantangan yang masih terjadi menunjukkan bahwa mencapai SDGs 4 tidak dapat dilepaskan dari persoalan kebijakan Pendidikan, termasuk dalam hal pengelolaan dan distribusi anggaran Pendidikan (June et al., 2022). Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh mengenai dinamika kebijakan anggaran pendidikan, penting untuk melihat secara kritis bagaimana realokasi anggaran pendidikan dapat memengaruhi pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan di berbagai daerah dalam upaya mencapai target SDGs 4 di Indonesia.

### **Dampak Perubahan Anggaran Terhadap keberlanjutan Ekosistem Pendidikan Nasional**

Perubahan alokasi anggaran pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan publik yang dapat memengaruhi keberlangsungan sistem pendidikan secara keseluruhan. Dalam perspektif kebijakan fiskal, perubahan anggaran dapat diartikan sebagai proses penyesuaian, pengukuran, atau pergeseran distribusi dana yang dialokasikan pemerintah untuk sektor tertentu sesuai dengan prioritas pembangunan nasional (Muchlis & Wahyudi, 2023). Dalam konteks pendidikan, perubahan alokasi anggaran tidak hanya

memengaruhi jumlah dana yang tersedia, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan berbagai komponen yang membentuk ekosistem pendidikan nasional. Secara umum, ekosistem pendidikan dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, seperti tenaga pendidik, peserta didik, sarana prasarana, kebijakan pendidikan, serta inovasi pembelajaran (Alamsyah, 2025). Keberlanjutan ekosistem pendidikan sangat bergantung pada stabilitas kebijakan pendanaan yang mampu memastikan bahwa seluruh komponen tersebut dapat berfungsi secara optimal. Ketika terjadi perubahan dalam alokasi anggaran pendidikan, maka stabilitas ekosistem tersebut berpotensi mengalami gangguan, terutama jika perubahan tersebut tidak diikuti dengan perencanaan kebijakan yang matang.

Di Indonesia, sektor pendidikan sebenarnya telah memperoleh perhatian besar dalam kebijakan fiskal nasional. Sejak diberlakukannya amanat konstitusi yang mengharuskan alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan, anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, anggaran pendidikan tercatat sekitar Rp. 208,3 triliun, kemudian meningkat menjadi sekitar Rp. 565 triliun pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 dianggarkan mencapai sekitar Rp. 724,3 triliun (Baskoro et al., 2025). Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Meskipun demikian, peningkatan anggaran tidak serta-merta menghilangkan berbagai tantangan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam beberapa kasus, perubahan atau penyesuaian alokasi anggaran dapat menimbulkan dampak terhadap keberlanjutan ekosistem pendidikan, terutama pada aspek kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta pengembangan inovasi pembelajaran.

#### 1. Dampak terhadap Kualitas Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik merupakan komponen utama sistem Pendidikan yang secara langsung memengaruhi kualitas proses pembelajaran. Program peningkatan kompetensi guru seperti pelatihan profesional, sertifikasi, serta pengembangan kapasitas pedagogik sangat bergantung pada dukungan anggaran pendidikan. Ketika terjadi perubahan alokasi anggaran, berbagai program peningkatan kapasitas tenaga pendidik berpotensi mengalami keterbatasan dukungan, sehingga dapat berdampak pada kualitas pembelajaran di dalam kelas (Widiani, 2024). Kondisi ini menjadi semakin penting mengingat Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan terkait kualitas dan distribusi tenaga pendidik. Di beberapa daerah, terutama wilayah terpencil dan tertinggal, ketersediaan guru yang berkualitas masih terbatas. Ketimpangan distribusi tenaga pendidik ini dapat memperburuk kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pendanaan yang memadai.

#### 2. Dampak terhadap Sarana dan Prasarana Pendidikan

Selain tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi komponen penting dalam keberlanjutan ekosistem pendidikan nasional. Infrastruktur pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas teknologi pembelajaran merupakan investasi yang berkelanjutan agar dapat mendukung proses belajar yang efektif. Perubahan alokasi anggaran pendidikan dapat memengaruhi pembangunan maupun pemeliharaan fasilitas pendidikan tersebut (Muharam, 2023). Apabila anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan

mengalami penyesuaian atau pengurangan, maka kualitas lingkungan belajar peserta didik dapat terpengaruh. Hal ini terutama dirasakan di daerah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan, sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah.

### 3. Dampak terhadap Inovasi Pembelajaran

Dalam era transformasi digital dan revolusi Industri 4.0, inovasi pembelajaran menjadi salah satu elemen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Inovasi tersebut mencakup pengembangan platform pembelajaran digital, integrasi teknologi informasi dalam proses belajar mengajar, serta pengembangan metode pembelajaran yang lebih adaptif dan partisipatif (Industri, 2024). Namun demikian, pengembangan inovasi pendidikan memerlukan dukungan anggaran yang memadai. Tanpa pembiayaan yang berkelanjutan, berbagai program inovatif dalam pendidikan berpotensi mengalami hambatan dalam implementasinya. Padahal, inovasi pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

### 4. Implikasi terhadap Pencapaian SDGs di Indonesia

Dampak perubahan alokasi anggaran pendidikan juga berkaitan erat dengan upaya pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan keempat, yaitu Quality Education. Tujuan ini menekankan pentingnya penyediaan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Meskipun berbagai kebijakan telah dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan, sejumlah indikator menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai target tersebut. Misalnya, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia pada tahun 2024 baru mencapai sekitar 32%, yang berarti hanya sekitar sepertiga penduduk usia kuliah yang dapat mengakses pendidikan tinggi. Angka ini masih tertinggal dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia (43%), Thailand (49%), dan Singapura yang telah mencapai lebih dari 90% (FADILAH, 2026).

Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan akses pendidikan masih memerlukan dukungan kebijakan yang kuat, termasuk dalam hal pengelolaan dan distribusi anggaran pendidikan. Tanpa dukungan pendanaan yang stabil dan berkelanjutan, upaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta mengembangkan inovasi pembelajaran akan sulit berjalan secara optimal. Dengan demikian, perubahan alokasi anggaran pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan ekosistem pendidikan nasional. Dampak tersebut dapat terlihat pada berbagai aspek, mulai dari kualitas tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga pengembangan inovasi pembelajaran. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan perlu dirancang secara strategis dan berkelanjutan agar mampu menjaga stabilitas sistem pendidikan sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan pendidikan dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

## **Analisis Keterkaitan Realokasi Anggaran Pendidikan, Ketimpangan Akses, dan Pencapaian SDG 4 di Indonesia**

Apabila dicermati secara lebih mendalam, persoalan ketimpangan akses pendidikan dan dinamika perubahan alokasi anggaran pendidikan sebenarnya saling berkaitan dan

membentuk satu rangkaian persoalan struktural dalam sistem pendidikan nasional. Ketimpangan akses pendidikan yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bagaimana kebijakan anggaran pendidikan dirancang, didistribusikan, dan diimplementasikan. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh bagaimana anggaran tersebut mampu memperkuat seluruh elemen dalam ekosistem pendidikan secara merata dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, meskipun konstitusi telah mengamanatkan alokasi minimal 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan anggaran belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan kualitas dan akses pendidikan antarwilayah (Indriaty et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola dan prioritas distribusi anggaran pendidikan. Ketika realokasi anggaran terjadi tanpa perencanaan yang mempertimbangkan kebutuhan daerah secara proporsional, maka dampaknya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas ekosistem pendidikan secara menyeluruh.

Ketimpangan akses pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti halnya perbedaan kualitas sekolah antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil, keterbatasan fasilitas pendidikan, serta rendahnya akses terhadap pendidikan tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi persoalan pemerataan. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika perubahan alokasi anggaran pendidikan tidak secara langsung diarahkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Dalam beberapa kasus, kebijakan realokasi anggaran justru lebih banyak terserap pada program-program yang bersifat administratif atau jangka pendek, sementara kebutuhan mendasar seperti peningkatan kualitas tenaga pendidik, pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah tertinggal, serta penguatan inovasi pembelajaran belum memperoleh perhatian yang proporsional. Dari perspektif ekosistem Pendidikan, perubahan anggaran yang tidak stabil dapat menimbulkan efek berantai pada berbagai komponen utama sistem Pendidikan (Aziza & Astuti, 2025). Keterbatasan pendanaan untuk pengembangan kompetensi guru, misalnya, dapat berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran di kelas. Pada saat yang sama, keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dapat menghambat terciptanya lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik. Kondisi tersebut pada akhirnya memperkuat kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dan memperlambat peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nasional.

Jika dikaitkan dengan agenda global yang dikemas dalam program internasional bernama Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan keempat, yaitu Quality Education, situasi ini menunjukkan bahwa pencapaian pendidikan berkualitas tidak hanya memerlukan peningkatan akses sekolah, tetapi juga memerlukan ekosistem pendidikan yang stabil dan berkelanjutan. SDG 4 menekankan bahwa pendidikan harus bersifat inklusif, merata, dan berkualitas sepanjang hayat. Namun, apabila kebijakan anggaran pendidikan tidak mampu menjaga keberlanjutan sistem pendidikan, maka upaya mencapai target tersebut akan menghadapi berbagai hambatan struktural (Asasi, n.d.). Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, pendidikan merupakan instrumen paling mendasar dalam meningkatkan kapasitas individu. Berbeda dengan sumber daya alam yang bersifat terbatas, kualitas sumber daya manusia dapat terus berkembang melalui proses pendidikan

yang berkelanjutan (Halean et al., 2021). Pendidikan memungkinkan individu mengembangkan keterampilan, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, investasi pada sektor pendidikan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menentukan arah pembangunan suatu bangsa dalam jangka panjang.

Kritik yang kemudian muncul dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia adalah bahwa pendidikan sering kali diposisikan sebagai sektor pendukung, bukan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Padahal, berbagai studi pembangunan menunjukkan bahwa negara yang mampu mencapai kemajuan ekonomi dan sosial secara signifikan umumnya menempatkan pendidikan sebagai prioritas strategis dalam kebijakan publiknya. Tanpa penguatan sistem pendidikan yang berkelanjutan, berbagai program pembangunan lainnya seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas ekonomi, maupun penguatan daya saing nasional akan sulit mencapai hasil yang optimal. Dengan demikian, analisis terhadap realokasi anggaran pendidikan dan dinamika ekosistem pendidikan menunjukkan bahwa pencapaian SDGs 4 di Indonesia sangat bergantung pada konsistensi dan keberlanjutan kebijakan pendanaan pendidikan. Realokasi anggaran seharusnya tidak hanya dipahami sebagai mekanisme penyesuaian fiskal semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta mendorong inovasi pembelajaran di seluruh wilayah Indonesia. Apabila kebijakan anggaran mampu diarahkan secara tepat untuk memperkuat seluruh komponen ekosistem pendidikan, maka pendidikan dapat benar-benar berfungsi sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mendukung pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## **Penutup**

Realokasi anggaran pendidikan merupakan kebijakan fiskal yang memiliki implikasi luas terhadap dinamika ekosistem pendidikan nasional serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs 4 tentang pendidikan berkualitas. Meskipun secara konstitusional pemerintah Indonesia telah memenuhi kewajiban alokasi minimal 20% anggaran negara untuk sektor pendidikan, dinamika distribusi dan prioritas penggunaan anggaran tersebut tetap menjadi faktor penentu dalam menentukan efektivitas pembangunan pendidikan nasional. Kebijakan realokasi anggaran pendidikan, seperti yang terjadi dalam pengintegrasian program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam fungsi pendidikan, menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Pemenuhan gizi peserta didik dipandang sebagai salah satu prasyarat penting bagi peningkatan kesiapan fisik dan konsentrasi belajar siswa. Namun demikian, kebijakan tersebut juga memunculkan perdebatan karena sebagian pihak menilai bahwa alokasi anggaran yang besar untuk program tersebut berpotensi menggeser fokus pembangunan inovasi pembelajaran.

Dalam konteks ekosistem pendidikan nasional, perubahan alokasi anggaran memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan berbagai komponen utama pendidikan. Kualitas tenaga pendidik, ketersediaan infrastruktur pendidikan, serta pengembangan inovasi pembelajaran merupakan elemen penting yang sangat bergantung pada stabilitas dan keberlanjutan dukungan pendanaan. Apabila perubahan alokasi anggaran

tidak dirancang secara strategis dan tidak mempertimbangkan kebutuhan daerah secara proporsional, maka kebijakan tersebut berpotensi memperkuat ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Ketimpangan akses pendidikan yang masih terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa besarnya anggaran pendidikan belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kualitas layanan pendidikan. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam upaya mencapai target SDGs 4 yang menekankan penyediaan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan di bidang pendidikan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan, distribusi, dan prioritas kebijakan dalam penggunaan anggaran tersebut.

Dengan demikian, realokasi anggaran pendidikan seharusnya dipahami sebagai instrumen strategis dalam memperkuat sistem pendidikan nasional, bukan sekadar mekanisme penyesuaian fiskal. Kebijakan pengelola anggaran pendidikan perlu dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan dengan tetap menempatkan penguatan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama. Melalui kebijakan pendanaan yang stabil, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengembangan inovasi pembelajaran dapat berjalan secara lebih optimal. Pada akhirnya, penguatan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan akan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Aini, K. N., & Indarti, N. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) sebagai Peningkatan Kesadaran Pajak Masyarakat di Grati Instrumen*. 6(3), 581–592. <https://doi.org/10.15294/baej.v6i3.35599>
- Aji, W. T., Studies, I. I., Islam, U., Sunan, N., & Yogyakarta, K. (2025). *Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran : Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru ?* 2(April). <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134>
- Akses, K., Di, P., Terpencil, D., Ham, I. S. U., Kebijakan, D. A. N., Di, H., Sosio, J., & Bulaksumur, Y. (2025). *Rohmatul Hasanah*. 4(1), 1–9.
- Alamsyah, T. P. (2025). *Peran Guru Penggerak Dalam Ekosistem Pendidikan : Studi Kasus Di Provinsi Banten*. 25(2), 191–200.
- Ardiansyah, H. (2025). *Peningkatan Kualitas Pendidikan Menuju SDG 4 : Kajian Literatur terhadap Tiga Pilar Utama Profesionalisme Guru , Kurikulum Relevan , dan Kebijakan Inklusif ”*. 9, 16586–16592.
- Ardianti, R., Lestari, A., Pendidikan, A., Jambi, U., Pendidikan, K., Pendidikan, K., Pendidikan, I., Inequality, E., Policy, E., & Infrastructure, E. (2025). *1 , 2 , 3*. 01(02), 65–70.
- Asasi, H. (n.d.). *Tujuan 4 : Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua Target Nasional untuk Pendidikan*. 1, 1–10.

- Aziza, N., & Astuti, M. (2025). *Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan , Inovasi dalam Sarana dan Prasarana Pendidikan*. 8, 6298–6305.
- Bahari, Y., & Tanjungpura, U. (2024). *Masalah Ketimpangan Pendidikan Indonesia dengan Kajian Struktural Fungsional Robert K . Merton*. 4, 2670–2680.
- Baskoro, M. S. P., Utara, M., & Gratis, M. B. (2025). *Jurnal Evaluasi Pendidikan ( JEP ) Jurnal Evaluasi Pendidikan ( JEP )*. 7(4), 25–40.
- FADILAH, S. (2026). *PENGARUH KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI ORANG TUA TERHADAP MOTIVASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE PERGURUAN TINGGI DI DESA SINAR REJO KECAMATAN KALIREJO LAMPUNG TENGAH*.
- Haida, N., Wahyuningsih, N., Islam, U., Bangsa, B., Berkelanjutan, T. P., & Review, L. (2024). *IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ( SDGS ) DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Abstract ,. 11*.
- Halean, S., Kandowangko, N., & Goni, S. Y. V. I. (2021). *PERANAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DI SMA NEGERI 1 TAMPAN AMMA DI TALAUD*. 14(2), 1–15.
- Heryana, A., & Unggul, U. E. (2024). *Pengolahan Data Penelitian : Desain Riset Kuantitatif Dan Kualitatif*. July. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18673.29280>
- Iii, B. A. B., Jenis, A., & Penelitian, P. (2023). *METODE PENELITIAN B . Setting Penelitian*. 32–42.
- Indriaty, D., Astriani, D., Sabrifha, E., & Aqilla, L. (2025). *Strategi Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Ketimpangan Sosial dan Budaya*. 5(2), 551–565.
- Industri, R. (2024). *Journal of Education and Culture*. 4(1), 28–35.
- Jarmita, N. (2025). *MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN Management Of Educational Facilities And Infrastructure To Improve The Quality Of Learning*. 11(April), 35–43.
- June, J., Rizqi, D., & Khotimah, K. (2022). *Abstrak Introduction Sustainable development is development that emphasizes future conditions by striking a balance between economic , social , and aspiration to realize sustainable development has been expressed in a general concept called the Sustainabl*. 7(1), 1–9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/educative.v7i1.5431> \*Corresponding
- Karuru, P. (2013). *Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian*. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 1–9. <http://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/jkip/article/view/149>
- Masruri, G. G., & Nugraha, H. (2026). *Program Makan Bergizi Gratis sebagai Instrumen Politik Janji Pemilu : Analisis Kebijakan Anggaran dan Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan Indonesia dalam Menyongsong Indoensia Emas 2045 . 4(4)*, 12100–12108.
- Mbg, P., Gizi, S., Sekolah, A., Arifia, S. A., Wahyuni, F., & Risal, Z. (2026). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Persiapan Menuju Indonesia Emas 2045 : Analisis Efektifitas Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*.

- 8(1), 538–546. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i1.10895>
- Muchlis, B. A., & Wahyudi, A. (2023). *KEBIJAKAN FISKAL DAN ANGGARAN DALAM*. 8(30), 779–799. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20721>
- Muharam, S. (2023). *Urgensi Infrastruktur Pendidikan Sebagai Wajah Peradaban Baru Ibu Kota Negara Indonesia Menuju Generasi Emas 2045*. 106–113.
- Oktavianatun, A., & Nugraheni, N. (2024). *Analisis Perkembangan Pendidikan Berkualitas Sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( SDGs )*. 1(12), 113–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11181016>
- Penggunaan, E., Bantu, A., Gerakan, R., Bagi, T., & Disabilitas, K. (2015). *Nur Fauziyah R., 2015 EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALAT BANTU REAKSI GERAKAN TANGAN BAGI KAUM DISABILITAS Universitas Pendidikan Indonesia | \upi.edu perpustakaan.upi.edu*. 33–47.
- Qadafi, M. (2026). *Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Tengah Prioritas Anggaran Program Makan Bergizi Gratis*. 6(April), 188–206.
- Risnawati, E., Suriansyah, A., Mulya, A., Harsono, B., Pendidikan, P., Sekolah, G., & Keguruan, F. (2025). *Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Peningkatan Efektivitas Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar*. 02(04), 832–842.
- Studi, P., Guru, P., Dasar, S., & Riau, U. (2025). *Jurnal basicedu*. 9(6), 1850–1855.
- Sudirman, F. A., & Lestari, D. T. (2024). *TINJAUAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ( SDGS ) DI AFRIKA : LITERATUR REVIEW*. 0042, 205–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.45814/share.v13i2.39327>
- Susanto, R., & Indah Pangesti. (2019). *PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI DKI JAKARTA*. 5(4), 340–350.
- Ustama, D. D. (2006). *DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN*. 1–12.
- Widiani, H. (2024). *Pengaruh Aspek Pembiayaan Untuk Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Guru*. 24(2), 203–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpp.v24i2.73348>